

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, menjadikan tentara sebagai pilar utama dalam menggerakkan pembangunan nasional, baik dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan politik yang diletakkan pada usaha penciptaan stabilitas politik yang sehat dan dinamis.<sup>1</sup> Pengalaman sosial-politik Orde Lama yang berakhir dengan tumbangnya PKI, menjadi legitimasi bagi militer untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menciptakan stabilitas negara dan sekaligus memberikan tempat kepada perwira ABRI untuk memegang jabatan politis seperti gubernur, bupati atau pun menjadi kepala desa dengan tujuan menegakkan Pancasila dan UUD 1945, menjaga stabilitas politik dan menggerakkan pembangunan.<sup>2</sup>

Kepemimpinan Orde Baru tersebut juga berlaku di Sumatera Barat, banyak perwira militer mengisi jabatan politis di daerah ini, misalnya Burhanuddin Putih (Bupati Limapuluh Kota 1975-1985), Ikasuma Hamid (Bupati Tanah Datar 1985-1995), dan Azwar Anas (Gubernur Sumatra Barat 1977-1987). Meskipun figur kepemimpinan militer diasumsikan otoriter dan bersikap tegas, tetapi karakter tersebut diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik yang mantap dan melahirkan keberhasilan pembangunan di daerah maupun nasional.

---

<sup>1</sup> Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto* (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004), hlm. 198.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 112

Untuk Kabupaten Padang Pariaman, kepemimpinan Bupati Anas Malik yang mewakili militer, banyak dibicarakan pada zamannya, bahkan sampai hari ini terutama ketika pemilihan kepala daerah di Pariaman. Kepemimpinan Bupati Anas Malik masa itu dianggap berhasil dan menonjol di Sumatera Barat. Ia memegang jabatan Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman selama dua periode berturut-turut, yaitu 1980-1985 dan 1985-1990. Secara resmi ia mulai menjabat Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman pada tanggal 1 September 1980 yang dilantik oleh Azwar Anas selaku Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Barat saat itu.<sup>3</sup> Sebelum menjadi bupati di kampung halamannya itu, ia adalah seorang prajurit ABRI yang sudah lama bertugas di lingkungan ABRI dan terakhir jabatannya adalah sebagai Kepala Penerangan Komando Daerah Militer V Jaya (Kapendam V Jaya), dengan pangkat Letnan Kolonel. Kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi Kolonel karena keberhasilannya dalam memimpin Kabupaten Padang Pariaman.<sup>4</sup>

Anas Malik pertama kali merintis karir militernya pada masa perang kemerdekaan di Padang dan setelah itu ia ikut menumpas pemberontakan-pemberontakan seperatis yang terjadi di Indonesia. Ia tidak terlibat dalam pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan G30S/PKI di Jakarta. Ketika terjadi PRRI di Sumatera Barat, ia sedang menempuh pendidikan Sekolah Calon Perwira (Secapa) di Jawa Barat. Sedangkan ketika meletus peristiwa G30S di Jakarta tahun 1965, ia berada di Sulawesi. Dengan terhindarnya dari kedua peristiwa tersebut sehingga memberi jalan mulus terhadap keberlanjutan karirnya di militer,

---

<sup>3</sup> Buku Kenangan DPRD Tingkat II Kab. Padang Pariaman Periode 1977-1982, hlm.34.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.41.

meskipun kemudian dampak PRRI memberikan pengaruh terhadap status kenaikan pangkatnya karena orang Minang dicap sebagai pemberontak. Selama menjalani pendidikan di Jawa Barat, ia pun dinilai berprestasi dan setelah tamat ia diangkat menjadi guru di almaternya. Kemudian ia ditugaskan di daerah DKI Jakarta. Selama menjalankan tugas di lingkungan ABRI, ia dianggap sebagai salah seorang perwira ABRI yang berhasil dan berprestasi oleh atasannya. Dengan keberhasilan dan prestasi itulah, ia direkomendasikan untuk menjabat sebagai kepala daerah di daerah asalnya Kabupaten Padang Pariaman.<sup>5</sup>

Kondisi daerah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pasca peristiwa PRRI dan peristiwa pemberontakan G30S telah mengalami tekanan yang cukup berat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama maupun mental psikologis masyarakat. Kehidupan rakyat benar-benar dalam keadaan yang sangat parah. Prasarana perhubungan dan ekonomi seperti jalan, jembatan, dan irigasi banyak yang rusak dan tak berfungsi, sawah dan ladang terlantar ditinggal oleh pemiliknya. Hubungan antar daerah di Sumatera Barat menjadi sangat sulit dan terisolir dari daerah luar maupun dari dalam daerah sendiri.<sup>6</sup>

Pada periode 1966-1998 merupakan era baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa sebagai ganti dari kemerosotan politik Orde Lama (1959-1966). Menurut Presiden Soeharto ketika berpidato di depan sidang DPR pada tanggal 16 Agustus 1970, Orde Baru merupakan koreksi total atas

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Maliana Malik, adik kandung Anas Malik, pada tanggal 27-28 Februari 2013 di Pariaman. Juga Wawancara dengan Irwan AF, anak ke-3 Anas Malik, pada tanggal 19 Oktober 2012 di Padang.

<sup>6</sup> Pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatra Barat 1987, *Memori Azwar Anas Gubernur KHD TK I Provinsi Sumatra Barat periode 1977-1982 dan 1982-1987* (Padang, 1987), hlm.11.

penyelewengan-penyelewengan di segala bidang yang terjadi pada masa-masa sebelumnya; dan di lain pihak, berusaha menyusun kembali kekuatan bangsa dan menentukan cara-cara yang tepat untuk menumbuhkan stabilitas nasional jangka panjang, yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).<sup>7</sup> Di mulai sejak 1969, pemerintah Orde Baru telah gencar melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi di seluruh Indonesia.<sup>8</sup> Rencana pembangunan itu praktis berlaku juga di daerah Sumatera Barat.

Memasuki Pelita I (1969-1974) dan II (1974-1979), Gubernur Harun Zain mulai benar-benar membangun kembali kepercayaan diri masyarakat Sumatera Barat yang sempat hancur akibat pemberontakan yang terjadi di daerah. Agenda pembangunan masa itu memprioritaskan pada upaya pelepasan Sumatera Barat dari isolasi dan pemulihan harga diri. Setahap demi setahap pembangunan yang dijalankan itu memberi landasan kokoh terhadap perbaikan kehidupan masyarakat pada pelaksanaan Pelita III (1979-1984).<sup>9</sup> Seirama dengan pembangunan daerah Sumatera Barat tersebut, di Daerah Kabupaten Padang Pariaman juga dilakukan pemulihan keadaan masyarakat yang dijalankan oleh Bupati Mohammad Noer (1966-1975) pada Pelita I dan kemudian dilanjutkan oleh Bupati Mohammad Zain Khatib (1975-1980) melalui program Pelita II, sehingga pelaksanaan Pelita III semakin membaik dibawah kepemimpinan Bupati Anas Malik.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> MustopadidJaja AR (Editor), *BAPPENAS Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-1925* (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 115 dan 118.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatra Barat, *Memori Azwar Anas Gubernur KHD TK I Provinsi Sumatra Barat Periode 1977-1982 dan 1982-1987* (Padang,1987), hlm.11.

<sup>10</sup> Buku Kenangan DPRD Tingkat II Kab.Padang Pariaman Periode 1977-1982 ,hlm.34.

Kepemimpinan Bupati Anas Malik menarik untuk dipelajari, karena kepemimpinannya di Kabupaten Padang Pariaman cukup menonjol di Sumatera Barat dengan diraihnya penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha pada Pelita III, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 1984. Selain itu, ia dianggap sosok bupati yang tegas dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman teruma dalam persoalan penegakkan K3 di daerah.

Bupati Anas Maik membangun Kabupaten Padang Pariaman berawal dari kebijakan K3 untuk menertibkan dan membersihkan kota Pariaman, kemudian membangun jalan pelosok desa melalui program manunggal ABRI Masuk Desa (AMD), pembangunan potensi pantai, menumbuhkan usaha rakyat seperti pertanian, perikanan, perindustrian, pariwisata dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Prestasi pembangunan yang diraih Padang Pariaman pada masa kepemimpinan Bupati Anas Malik ini, tentu sangat menarik untuk diangkat menjadi suatu kajian ilmiah yang mendalam, dengan melihat konteks kepemimpinan pada zamannya, yakni Orde Baru.

Dari buku yang ditulis oleh Abrar Yusra dengan judul *Azwar Anas Teladan dari Ranah Minang*, yang diterbitkan pada tahun 2011,<sup>12</sup> memuat beberapa halamalan cerita tentang kebijakan K3 Anas Malik yang berasal dari pameo “WC terpanjang di dunia”.

---

<sup>11</sup> [www.harianhaluan.com/index.php?option=com](http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com), akses pada tanggal 3 Maret 2013.

<sup>12</sup> Abrar Yusra, *Azwar Anas Teladan Dari Ranah Minang* (Jakarta: Kompas, 2011).

Bagindo Armaidi Tanjung dalam bukunya yang berjudul *Kota Pariaman, Dulu, Kini, dan Masa Depan*, yang diterbitkan pada tahun 2006,<sup>13</sup> berbicara mengenai sejarah kota Pariaman masa lampau hingga menjadi kota otonom sekarang. Pembahasan utama banyak berbicara tentang kota Pariaman dalam konteks kekinian dengan melihat pengembangan potensi Kota Pariaman ke depan.

Buku yang ditulis oleh Muslim Kasim yang berjudul *Strategi dan Potensi Padang Pariaman, Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*, yang diterbitkan pada tahun 2004,<sup>14</sup> berisi mengenai gambaran potensi sektor unggulan yang dimiliki Padang Pariaman dan prospek pengembangannya ke depan serta peluang investasi dan kerjasama.

Berikutnya, buku yang ditulis oleh Hary Effendi, Zulqayyim, Zaiyardam Zubir, yang berjudul *Inyo Ajo Wak Juo, Solidaritas Primitif, Uang, dan Kekuasaan Dalam Pemilihan Bupati Padang Pariaman*, yang diterbitkan pada tahun 2011,<sup>15</sup> membahas tentang budaya politik memilih bupati yang terjadi di Padang Pariaman pada tahun 2005 di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, terlihat belum ada karya tulis yang membahas tentang kepemimpinan Bupati Anas Malik di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam konteks itulah, penelitian dan penulisan skripsi ini dilakukan dengan mengangkat judul: *Kepemimpinan Bupati Anas Malik di Kabupaten Padang Pariaman 1980-1990*.

---

<sup>13</sup> Bagindo Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman, Dulu, Kini dan Masa Depan* (Padang: Pustaka Artaz, 2006).

<sup>14</sup> Muslim Kasim, *Strategi dan Potensi Padang Pariaman, Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi* (Jakarta: Indomedia, 2004).

<sup>15</sup> Hary Effendi Dkk, *Inyo Ajo Awak Juo, Solidaritas Primitif, Uang dan Kekuasaan Dalam Memilih Bupati Padang Pariaman* (Padang: Minang Press dan PSH UNAND, 2011).

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Batasan spasial penulisan ini adalah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, karena di daerah inilah Anas Malik menjabat sebagai bupati. Daerah-daerah lain yang disinggung dalam pembahasan ini, hanyalah sebatas untuk keperluan menyinggung tempat tugas Anas Malik sebelum menjadi bupati. Untuk batasan temporal, penulisan ini mengambil dari tahun 1980 sampai tahun 1990, karena dalam kurun waktu inilah Anas Malik memegang tampuk pemerintahan di daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Sehubungan dengan itu, tulisan ini akan membatasi pokok persoalan melalui pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah latar belakang kehidupan dan kepemimpinan Anas Malik hingga terpilih menjadi bupati Padang Pariaman?
2. Apa sajakah kebijakan Bupati Anas Malik dalam bidang sosial-budaya di Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apa sajakah kebijakan Bupati Anas Malik dalam bidang ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman?
4. Bagaimanakah gaya kepemimpinan Bupati Anas Malik selama menjadi bupati di Kabupaten Padang Pariaman.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengungkap latar belakang kehidupan dan kepemimpinan Anas Malik dari militer ke politik
2. Untuk mengungkap kebijakan Bupati Anas Malik dalam bidang sosial-budaya di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan Anas Malik dalam menjalankan tugas sebagai bupati Padang Pariaman.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan kajian sejarah terutama kajian biografi sejarah politik dan sebagai bahan informasi serta perbandingan bagi pembaca yang tertarik membahas topik yang sama.

### **D. Kerangka Analisis**

Tema tulisan ini berkaitan dengan persoalan kepemimpinan yang merupakan sebuah proses pengaruh satu arah atau timbal balik untuk mencapai ketaatan. Kepemimpinan itu bisa saja difokuskan pada satu individu.<sup>16</sup> Dalam hal ini dikaitkan pada figur Anas Malik sebagai Bupati Padang Pariaman. Selain itu, Penelitian ini berkaitan dengan studi biografi sejarah politik yang memusatkan perhatian terhadap aktivitas kepemimpinan seorang tokoh pada masa lampau, yaitu era Orde Baru.

---

<sup>16</sup> Kuper Adam, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial/Penterjemah Haris Munandar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).



Biografi dianggap bagian dari penulisan sejarah, biografi sebagai historiografi.<sup>17</sup> Biografi adalah kisah atau riwayat hidup seseorang. Dalam biografi akan ditemukan hubungan keterkaitan arti dari tindakan tertentu atau misteri yang melingkupi hidup seseorang serta menjelaskan mengenai tindakan dan perilaku hidupnya.<sup>18</sup> Menurut Kuntowijoyo biografi atau kisah hidup seseorang itu, meskipun bersifat mikro tetapi menjadi bagian penting dalam mosaik sejarah yang lebih besar, dengan adanya biografi maka akan dipahami para pelaku sejarah, zaman, dan lingkungan sosial-politiknya.<sup>19</sup> Senada dengan itu, Taufik Abdullah juga mengemukakan bahwa biografi adalah suatu bentuk penulisan sejarah yang berusaha untuk mengungkapkan aktivitas seseorang dalam konteks waktu tertentu, tanpa mengabaikan hubungan tokoh tersebut dengan perkembangan zaman dan lingkungannya.<sup>20</sup> Dalam hal ini, kepemimpinan Anas Malik di daerah Padang Pariaman erat hubungannya dengan politik pemerintahan Orde Baru. Pada umumnya kebijakan yang dijalankan di daerah merupakan perpanjangan dari kebijakan pembangunan pusat untuk menjaga kestabilan politik yang sehat dan dinamis.

Sedangkan kepemimpinan adalah masalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi sosial di antara pemimpin dan individu-

---

<sup>17</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n2010), hlm.376.

<sup>18</sup> [http://dennysb.multiply.com/journal/item/107/Apa\\_itu\\_BIOGRAFI?&](http://dennysb.multiply.com/journal/item/107/Apa_itu_BIOGRAFI?&), akses 21 Maret 2012.

<sup>19</sup> R.Z Leirissa, *Biografi, Pemikiran Biografi dan kesejarahan, Suatu Kumpulan Prasarana Pada Pelbagai lokakarya* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), hlm.15.

<sup>20</sup> Taufik Abdullah, *Manusia dalam Kemelut Sejarah* (Jakarta: LP3ES, 1978), hlm.2.

individu yang dipimpin (adanya hubungan interpersonal). Kepemimpinan ini bisa berfungsi sebagai kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan mengerakkan orang-orang untuk melakukan sesuatu demi tercapainya suatu tujuan tertentu.<sup>21</sup>

Kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga-lembaga pemerintahan) dan yang berlangsung dalam infastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan).<sup>22</sup> Pemimpin politik umumnya lebih menggunakan hubungan formal dan personal dalam menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep kepemimpinan politik merupakan hal yang pokok dalam sistem politik dalam kerjasama mencapai suatu tujuan. Hal ini menimbulkan beberapa inti yang terkandung dalam kepemimpinan politik itu, yaitu pengaruh, konteks kepemimpinan politik atau kelompok serta adanya suatu tujuan.<sup>23</sup> Hubungan pemimpin politik Bupati Anas Malik tidak lepas dari kiprahnya sebagai perwira militer. Ia diperintahkan oleh atasannya untuk memegang jabatan politis, yaitu sebagai kepala daerah di Kabupaten Padang Pariaman pada masa pemerintahan nasional Orde Baru.

Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang unik, sehingga tingkah laku dan gayanya ini pasti akan mewarnai prilaku dan tipe kepemimpinannya.<sup>24</sup> Tipe kepemimpinan masa Orde

---

<sup>21</sup> Kartono dan Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm.5-6.

<sup>22</sup> Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm.12

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.65.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.34..

Baru sering diidentikkan dengan kepemimpinan militeristik. Kepemimpinan militeristik ini mirip dengan tipe kepemimpinan otokratis, yaitu kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan perilaku otoriter.

Kepemimpinan kepala daerah masa Orde Baru mempunyai kekuasaan yang cukup besar dan signifikan, dibandingkan dengan unsur pemerintah lainnya seperti legislatif dan yudikatif, bahkan telah menciptakan kekuasaan yang cenderung tidak terbatas.<sup>25</sup>

Masuknya kepemimpinan militer dalam negara pada hakikatnya bukan merupakan penonjolan karakteristik sosial militer, akan tetapi merupakan respon (reaksi) dari struktur politik dan institusional masyarakat yang belum mapan, yang masih lemah, berantakan, kisruh dan kacau.<sup>26</sup> Melalui mekanisme dwi-fungsi ABRI, militer dijadikan sebagai motor penggerak pembangunan. Slogan pembangunan antara lain, melalui “*Trilogi Pembangunan*”, yaitu pertumbuhan; pemerataan; dan stabilitas. Dalam stabilitas itulah terkandung “*pendekatan keamanan*” yang menuntut peranan besar ABRI. Dwi-fungsi ABRI menjadi jawaban yang paling tepat bagi tuntutan pembangunan.<sup>27</sup> Sebagai Prajurit ABRI yang banyak pengalaman di perantauan, Anas Malik diperintahkan dan dipercaya memegang jabatan politik di daerah Padang Pariaman. Dengan latar belakang karir militer, ia dinilai berhasil membawa daerah Padang Pariaman ke arah kemajuan pembangunan, baik fisik maupun non fisik.

---

<sup>25</sup>J.Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.32.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 293.

<sup>27</sup> Sri-Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru ke Indonesia Lewat Reformasi Total* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.167.

## **E. Metode Penelitian dan Bahan Sumber**

Metode penelitian skripsi ini terbagi atas empat langkah sebagaimana yang diatur dalam metode sejarah. Langkah pertama adalah heuristik yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau atau penemuan sumber sejarah. Sumber sejarah tersebut terbagi atas sumber lisan dan tertulis.<sup>28</sup> Sumber lisan diperoleh dari serangkaian wawancara (*interview*) yakni mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.<sup>29</sup> Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah keluarga Anas Malik dan orang-orang sezaman yang terlibat langsung dalam pemerintahan Anas Malik di Kabupaten Padang Pariaman seperti Syofyan Idris (mantan ketua DPRD), Ramli (Ajudan), Nasrun Jon (Wartawan), Iyon Syaraf (Keluarga Pejuang di Padang), Imam Maaz (ketua KAN Aia Pampan), Anas Yusuf (anggota DPRD), Imam Dt Achroeddin serta masyarakat biasa.

Sumber tertulis terutama diperoleh dari Perpustakaan dan Arsip Padang Pariaman serta dari koleksi pribadi Bagindo Armaidi Tanjung. Data tertulis lainnya didapatkan dari Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Barat, Perpustakaan Gedung Juang 45, dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.

Setelah data didapatkan, maka dilakukan kritik sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik intern dan ekstern. Kemudian data yang sudah lolos kritik ditafsirkan dengan menguraikannya dalam bentuk sintesis, yaitu penyatuan data

---

<sup>28</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hlm.96.

<sup>29</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (edt), *Metode Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.192.

yang saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk sebuah cerita ilmiah.<sup>30</sup> Langkah terakhir adalah historiografi, yaitu penyampaian sintesa yang diperoleh dalam suatu bentuk kisah.<sup>31</sup>

## **F. Sistematis Penulisan**

Pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab. Bab pertama, yaitu memuat latar belakang masalah, pokok persoalan, tujuan, manfaat penelitian, kerangka analisis, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematis penulisan.

Bab kedua berisi mengenai latar belakang kehidupan dan kepemimpinan Anas Malik, dimulai dari masa ia sekolah, ikut tertarik menjadi tentara di Padang dan menjalani tugas sebagai prajurit di daerah pemberontakan dan bertugas di Jakarta, hingga kemudian ia diperintahkan menjadi Bupati Padang Pariaman.

Bab tiga, membahas tentang kepemimpinan Anas Malik selama menjadi Bupati Padang Pariaman di bidang sosial-budaya seperti program K3, pembangunan jalan pelosok desa melalui program manunggal AMD, pembangunan bidang pendidikan dan keagamaan, dan program kesehatan dan budaya

---

<sup>30</sup> Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.58.

<sup>31</sup> Nugroho Nutosusanto, *Norama-Norama Sejarah* (Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata RI Pusat Sejarah Dan Tradisi ABRI, 1998), hlm.20.

Bab empat dari penulisan ini membahas tentang kebijakan Anas Malik dalam bidang ekonomi di daerah Padang Pariaman terkait tentang pembangunan infrastruktur ekonomi, pertanian, perikanan, industri dan koperasi, pariwisata dan Kotif Pariaman.

Bab lima, merupakan kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya serta berisi uraian singkat pasca kepemimpinan Anas Malik.